

PERIODE 2024-2029

5 Anggota BPK Ucapkan Sumpah Jabatan



KR-Istimewa

Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan Anggota BPK RI.

JAKARTA (KR) - Lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih untuk periode 2024-2029, mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin. Lima Anggota BPK tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut merupakan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2024-2029 yang diselenggarakan DPR RI, dan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada 10 September 2024, dengan Surat Keputusan Nomor 14/DPR RI/II/2024-2025 tentang Persetujuan DPR RI

Terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2024-2029.

Pengambilan sumpah jabatan yang dipandu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto dilakukan sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan, sebelum memangku jabatannya, Anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Pengucapan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan BPK.

Kelima Anggota BPK tersebut menggantikan Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya, yaitu Hendra Susanto

(Wakil Ketua merangkap Anggota),

Daniel Lumban Tobing (Anggota),

Achsanul Qosasi (Anggota), Ahmadi

Noor Supit (Anggota), dan Pius

Lustrilanang (Anggota).

Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat Auditor Utama KN I BPK. Bobby Adhityo Rizaldi merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Budi Prijono sebelumnya menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Sementara, Daniel Lumban Tobing sebelumnya Anggota II BPK periode 2019-2024. Daniel kembali terpilih dan memasuki periode jabatan kedua sebagai Anggota BPK. Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI setelah menjadi Anggota DPR RI sejak 2014.

Setelah pengucapan sumpah jabatan ini, keanggotaan BPK menjadi lengkap berjumlah sembilan orang, bersama Anggota BPK lainnya, yaitu Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Haerul Saleh, dan Slamet Edy Purnomo. "Pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota BPK akan ditentukan kemudian sesuai Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI," kata Teguh Widodo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI dalam siaran persnya kepada

TNI **Sambungan hal 1**

Satgas Udara (Komando Operasi Udara I TNI AU), Satgas Komunikasi dan Elektronika (Satkomlek TNI) dan Satgas Siber (Satsiber TNI).

Kesepuluh satgas itu dikendalikan Kogabpadpam VVIP yang dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksmamana Madya TNI Rachmad Jayadi.

Operasi pengamanan VVIP untuk acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung selama sepekan, yaitu pada 17-23 Oktober 2024. Rangkaian operasi mencakup persiapan, simulasi taktik, apel gelar pasukan, geladi kotor, geladi bersih dan operasi pengamanan.

Panglima TNI menyebut prajurit yang dikerahkan untuk keseluruhan operasi penga-

manan ada 100.000 orang, termasuk di dalamnya 24.000 personel lebih yang tergabung dalam Kogabpadpam VVIP.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam amanatnya saat apel gelar pasukan untuk pengamanan VVIP di Lapangan Silang Monas, kemarin memerintahkan seluruh prajurit berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Polri, saat bertugas. Selepas apel, Kapolri menyebut sebagian besar personel Polri telah menempati posisi mereka berjaga. **(Ant)-d**

Pelantikan **Sambungan hal 1**

Hal itu disampaikan ketika ditanyakan dekorasi apa yang dipersiapkan MPR dalam menggelar acara kenegaraan lima tahunan itu. "Saya *nggak* berani *ngomong*, takutnya nanti ada hal-hal lain yang berubah, karena kan *kayak* tamu undangan dari kepala negara itu pun masih dalam konfirmasi, artinya itu masih hal-hal yang akan berubah, jadi belum *fixed*," ucapnya.

Ia memastikan, secara desain, konsep dekorasi yang akan dipasang untuk acara pelantikan telah rampung, sehingga hanya tinggal diimplementasikan. "Ya, pastinya desain (dekorasi) terus apa yang akan kami lakukan baik dari mulai gerbang bawah, drop off, sampai tempat acara pelantikan ini sudah didesain sedemikian rupa, tinggal implementasinya," katanya.

Ia menyebutkan, hiasan bunga yang akan jadi salah satu unsur dekorasi acara pelantikan pun akan difinalisasi pada Sabtu (19/10) petang. "Kalau bunga itu dipasang 19 (Oktober) sore, tapi bunga yang cukup tahan lama sudah mulai dipasang. *Finishing*-nya di Sabtu hari ini," ujarnya.

MPR RI menggelar geladi kotor menjelang acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat kemarin.

Kegiatan tersebut digelar mulai pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara, gedung berbentuk tempurung kura-kura yang menjadi ciri khas gedung parlemen tanah air. Karpet merah pun sudah terpasang mulai dari pintu masuk utama, hingga ke ruang rapat paripurna di lantai tiga digelar tersebut.

Geladi kotor itu mulai digelar dengan simulasi kedatangan para tamu kenegaraan hingga tamu VVIP. Simulasi itu berulang-ulang menggunakan iring-iringan mobil, lengkap dengan motor pengawal.

Selain di area luar, geladi kotor juga berlangsung di dalam ruang rapat paripurna Gedung Nusantara. Di dalam ruangan itu, pasukan drum band dan grup pemusik juga beberapa kali melakukan latihan.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan, tamu-tamu negara yang akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih mulai tiba di tanah air Sabtu (19/10) hari ini.

"Berdasarkan informasi, tamu-tamu negara sudah mulai berdatangan, yaitu para tamu negara dan sahabat dan tentunya ada kekhususan undangan dari Bapak Presiden Prabowo, di mana tanggal 19 ada dua lokasi untuk tamu negara tiba di Indonesia atau Jakarta, yaitu di Halim (Perdanakusuma) dan Soekarno Hatta," kata Heru.

Ia mengatakan, tamu negara yang mengonfirmasi hadir dari 20 negara plus satu utusan PBB dan akan terdapat 13 perwakilan khusus kepala negara. "Kami sudah mempersiapkan ini bersama Kemenu, jajaran TNI AU dan Lanud Halim, juga bersama dengan Bandara Soetta," ujar Heru.

Menurut Heru, akan ada prosesi penerimaan kepala negara yang tiba di Bandara Halim Perdanakusuma maupun Soekarno-Hatta. Pihak Istana juga telah mempersiapkan hotel untuk para kepala negara dengan baik.

Heru juga telah meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menayangkan kedatangan para tamu negara melalui videotron yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Selanjutnya pada Minggu, 20 Oktober 2024, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor dan mengantiingnya dengan panggung hiburan rakyat di sepanjang jalan yang akan dilalui presiden dan wakil presiden terpilih dari Gedung MPR/DPR/DPD RI menuju Istana Merdeka.

Hiburan rakyat akan digelar mulai dari Ratu Plaza, Senayan, hingga Patung Kuda, Jakarta.

Heru berharap pemilik-pemilik gedung di kawasan Sudirman-Thamrin juga bisa mengerahkan karyawannya untuk bisa menyambut acara pada tanggal 20 Oktober di sekitar Sudirman-Thamrin. Usai acarapisah sambut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (20/10) malam sebagian tamu negara akan dijamu presiden terpilih. **(Ant/Obi)-d**

BNN **Sambungan hal 1**

mengonsumsi atau menggunakan ganja sebagai pilihan utama. Untuk diketahui Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan yang diajukan Pipit Sri Hartanti dan Supardji

atas pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Pipit dan

Supardji merupakan orang tua dari Shita Aske Paramitha yang mengidap cerebral palsy sejak kecil.

(Ant/Has)-f

Bedah **Sambungan hal 1**

dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mantan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Dirut PT BP *Kedaulatan Rakyat* Drs HM Idham Samawi.

Menurut Hasto, PDIP menggunakan ikatan emosional kader dengan presiden pertama RI Soekarno dan materi kepemimpinan yang diaplikasikan di sekolah partai PDIP untuk memperkuat para kadernya, sehingga bertahan dari berbagai goncangan dinamika politik. Hasto mengatakan hal tersebut berhasil, sehingga membuat PDIP bertahan, khususnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan kekuasaan untuk menggerus partai dalam Pilpres 2024. "Guncangan terhadap pelebmbagaan

partai terjadi pada Pilpres 2024 berupa *abuse of power* dan *power behavior* dengan karakternya *authoritarian populism*. Karakter ini lahir dari perpaduan feudalisme, populisme dan machiavellian yang digerakkan ambisi kekuasaan," tuturnya.

Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi sumber keteladanan dan otoritas moral, ucap Hasto, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif, menjadi *core element* ambisi kekuasaan, demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya. Implikasinya pun sangat serius, dimana kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum dan penggunaan sumberdaya negara dan alat-alat negara yang merubah total watak demokrasi yang berkedaulatan rakyat menjadi demokrasi kekuasaan.

Promovendus menyimpulkan, kepemimpinan Megawati memiliki pengaruh kuat terhadap ketahanan partai. Selain itu, menurut Hasto, kepemimpinan ketum partainya tersebut bersifat lentur dengan daya adaptasi untuk bertahan atau dan memulihkan diri dari berbagai goncangan dinamika politik.

"Kemampuan PDIP bertahan dalam menghadapi *the triangle of authoritarian populism* menjadikan PDIP sebagai model yang representatif bagi studi pelebmbagaan dan ketahanan partai. Megawati Soekarnoputri memiliki legasi sebagai tokoh pro-demokrasi, penjaga demokrasi dan konstitusi serta tradisi kepemimpinan intelektual yang tumbuh dari pengalaman hidupnya yang sangat kompleks," papar Hasto. **(Ati)-f**

DIY **Sambungan hal 1**

sebagai raja atas Yogyakarta. Piagam itu mengamanatkan supaya Sultan HB IX memimpin Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari RI. Piagam itu kemudian direpons oleh Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII dengan mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang menyatakan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa di dalam RI yang dipimpin oleh mereka berdua.

Keberlanjutan DIY di era-era kekuasaan para presiden selanjutnya mengalami dinamika yang luar biasa. Di era Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, DIY dan Daerah Istimewa Aceh malahan sempat akan dihapuskan demi alasan penyeragaman pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Di era kekuasaan Habibie, Gus Dur, dan Megawati status DIY juga belum mendapatkan kepastian. Hal itu bisa dimaklumi karena masa-masa awal Reformasi masih diwarnai banyak gonjang-ganjing, namun setidaknya di fase-fase itu DIY teruji Keistimewaannya karena berulang kali rakyat Yogya mengukuhkan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY, sebagai basis ciri asimetris pemerintahan DIY.

Era kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo (2014-2024) sangat

menentukan keberlanjutan Keistimewaan DIY. Meskipun melalui proses yang alot dan berlarut-larut, akhirnya SBY-lah yang mensahkan UU Keistimewaan DIY (UU Nomor 13 Tahun 2012) yang secara rinci mengatur Keistimewaan DIY. Setelah penetapan itu, implementasi UUK berjalan lancar dan berhasil selama masa kekuasaan Presiden Jokowi. Dukungan berbentuk Dana Keistimewaan (Danais) juga lancar. DIY dengan Keistimewaannya pun berhasil meraih banyak capaian seperti Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tertinggi di Indonesia (2018) dan bahkan Sumbu Filosofi Yogya berhasil ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia (2023).

Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan mendukung keberlanjutan DIY lebih intensif lagi. Dukungan itu sebenarnya sudah terlihat ketika RUUK sedang diperjuangkan. Seperti dilansir banyak media, pada 2010 Ketua Umum Partai Gerindra ini mendukung pengesahan RUUK yang berbasis sejarah kebangsaan. Ia menandakan pentingnya sejarah Yogyakarta dan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Menurutny, Keistimewaan DIY bukan kepentingan segelintir orang tetapi kepentingan persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia.

Bergabungnya mantan Presiden SBY ke kubu Prabowo diharapkan juga menjadikan rezim Prabowo nantinya semakin mendukung keberlanjutan Keistimewaan DIY. Ketika mengkampanyekan Prabowo di GOR Kridosono Yogyakarta beberapa waktu lalu, SBY mengingatkan kepada publik tentang kontribusi pemerintahannya dulu dalam pengesahan UUK. SBY juga menyatakan kecintaannya pada Yogya yang tumbuh sejak beberapa kali tinggal di tenda pengungsian bersama rakyat ketika bencana Merapi meletus.

Pemikiran presiden terpilih sebagian terungkap dalam bukunya berjudul iKepemimpinan Militer: Catatan dan Pengalaman Letjend TNI (Purn) Prabowo Subianto (2022). Dalam buku ini ia mengupas kepemimpinan militer Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, dan Jenderal Sudirman yang berkaitan langsung dengan sejarah Yogyakarta. Di sinilah pemikiran Prabowo sejalan dengan pemikiran DIY tentang prinsip-prinsip nasionalisme, patriotisme, ideologi, dan kemiliteran. Prabowo Subianto berpotensi merevitalisasi Keistimewaan DIY yang dijiwai oleh semangat-semangat kebangsaan itu.

(Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-d

Struktur **Sambungan hal 1**

jaminan sosial, perlindungan kerja, serta akses yang adil terhadap pelatihan dan pengembangan profesional," kata Dede.

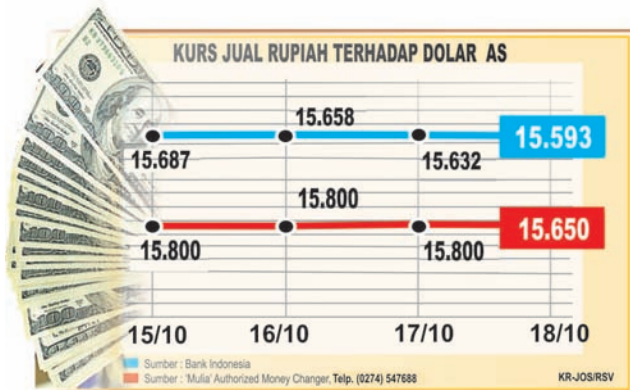
Dede memahami, Pemerintah sudah berusaha memperbaiki sistem perekrutan guru melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akan tetapi, ia memandang posisi yang ditawarkan dalam seleksi PPPK belum mampu menampung semua guru honorer di Indonesia.

"Tapi kan proses ini juga enggak mudah. Slot yang diberikan tidak mencukupi untuk guru honorer eksisting yang jumlahnya sangat besar itu," katanya.

Dede lalu mengingatkan, faktor kesejahteraan bagi guru berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan. "Jangan sampai masa depan penerus

bangsa menjadi terdampak akibat kurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan guru," ujar Dede.

(Ant/San)-d



Prakiraan Cuaca					19 Oktober 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
Cerah	Berawan	Udara Kabin	Hujan Lokal		Grafis : Arko	

Surya Tri Almaja Ramadhani, SKom MEng
Dosen Teknik Informatika
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi 2024: Melindungi Privasi Masyarakat di Era Digital

pribadi kita dengan mudah diakses dan tersebar di berbagai platform online. UU PDP diharapkan menjadi payung hukum yang melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi yang semakin sering terjadi.

Manfaat terbesar dari UU PDP adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi setiap individu atas data pribadinya. Data pribadi meliputi segala jenis informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, data keuangan, hingga data medis. UU PDP

memberi masyarakat hak-hak baru dalam pengelolaan data mereka, seperti hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, hak untuk memberi atau menarik persetujuan atas penggunaan data, serta hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka.

Dengan UU PDP, setiap penyedia layanan, baik di sektor swasta maupun publik, harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum mengumpulkan dan memanfaatkan informasi pribadi mereka. Hal ini mengurangi risiko penyalahgunaan data oleh

pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemiliknya. Masyarakat juga diberikan hak untuk meminta klarifikasi mengenai bagaimana data mereka diproses, dan berhak menolak jika data tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan adanya perlindungan dari UU PDP, masyarakat kini dapat lebih yakin bahwa data mereka aman dan dilindungi oleh hukum, serta tidak akan digunakan secara sembarangan atau dijual kepada pihak lain tanpa izin.

Isu utama yang diselesaikan oleh UU PDP

adalah masalah kebocoran data. Insiden kebocoran data sering terjadi di Indonesia, dan berdampak luas pada masyarakat. Beberapa kasus kebocoran data besar melibatkan platform digital, perusahaan, hingga lembaga publik, di mana informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat email, dan data keuangan jutaan pengguna tersebar tanpa kontrol. UU PDP mengharuskan pihak yang menyimpan dan mengelola data pribadi untuk menerapkan standar keamanan yang ketat, serta memberikan hukuman berat kepada mereka yang gagal melindungi data pengguna.

Selain itu, UU PDP memberikan solusi bagi penyalahgunaan data untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemilik data. Di era digital ini, banyak perusahaan yang secara sepihak menggunakan data pengguna untuk kepentingan pemasaran atau analisis bisnis tanpa izin. UU PDP mewajibkan perusahaan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan data pribadi untuk keperluan semacam ini, memberikan kontrol lebih besar kepada pemilik data.

Dengan adanya UU PDP, Indonesia melangkah maju dalam memberikan

perlindungan atas data pribadi di era digital. Masyarakat kini memiliki hak dan perlindungan hukum yang jelas atas informasi pribadi mereka. UU ini diharapkan bisa mengurangi risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, serta memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat dalam hal pengelolaan data. Meski begitu, keberhasilan UU ini sangat bergantung pada edukasi yang tepat serta penerapan yang konsisten di lapangan.

UNIVERSITAS
AMIKOM
YOGYAKARTA

Creative Economy Park